

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

- a. Proses implementasi kebijakan retribusi pelayanan di Pasar Kayubulan Kabupaten Gorontalo, baik dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, maupun evaluasi sudah dilakukan, namun belum efektif. Legalitas pungutan atas parkir, toilet, kebersihan pasar, dan penyewaan lapak milik pihak lain, masih menjadi kelemahan dalam tahap perencanaan. Dilihat dari tahap pelaksanaan, penetapan tarif retribusi belum sepenuhnya mengacu pada Perda Nomor 6 Tahun 2017 karena mempertimbangkan kondisi 72% pedagang yang juga dibebankan dengan penyewaan lapak kepada pihak lain sebagai sarana untuk berdagang. Disisi lain, pemilik lapak tersebut tidak ditetapkan sebagai subjek retribusi di Pasar Kayubulan. Pada tahap evaluasi, prinsip akuntabilitas dan transparency dalam pengelolaan retribusi di Pasar Kayubulan sudah diterapkan dengan menyertakan karcis setiap kali pemungutan retribusi dan pelaksanaan rekonsiliasi setiap tiga bulan. Fungsi pengawasan dan evaluasi juga sudah dilakukan oleh Kasie Pengawasan dan Retribusi Pasar meskipun tidak secara rutin.
- b. Secara umum, faktor komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi sudah mendukung keberhasilan pelaksanaan kebijakan retribusi

pelayanan di Pasar Kayubulan. Komunikasi antara implementor dan kelompok sasaran terjalin dengan baik. Meskipun hanya berjumlah 6 (enam) orang, kolektor di Pasar Kayubulan mampu menarik retribusi kepada ratusan pedagang. Namun, kurangnya anggaran menghambat penyediaan fasilitas los permanen di pasar ini. Ditinjau dari disposisi, menunjukkan bahwa kolektor aktif melaksanakan pemungutan disetiap hari pasar. Semua implementor juga melaksanakan tugas sesuai dengan wewenang masing-masing. Akan tetapi, struktur birokrasi belum mendukung secara maksimal karena tidak ada SOP (Standar Operasional Prosedur) yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan kebijakan. Sementara itu, belum ada struktur organisasi yang menunjukkan eksistensi kepala pasar dan kolektor dalam pelaksanaan kebijakan retribusi pelayanan di Pasar Kayubulan.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, maka saran penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Sebaiknya Staf Disperindag melakukan peninjauan di lapangan, secara rutin tiga bulan sekali untuk menjamin keakuratan data potensi pasar. Sebab, belum ada sistem pendaftaran dan penetapan pedagang. Sehingga penyediaan lapak dari pihak lain membuka kesempatan bagi kepala pasar dan kolektor untuk memanipulasi jumlah pedagang dan hasil retribusi.

- b. Sebaiknya, Staf Pengelolaan Disprindag Kabupaten Gorontalo dengan tegas menetapkan orang atau badan yang menyewakan lapaknya kepada pedagang, sebagai subyek retribusi di Pasar Kayubulan.
- c. Sebaiknya, Pemerintah Daerah menjalin kerjasama dengan pihak swasta dalam melakukan ekstensifikasi perluasan objek retribusi secara bertahap di setiap tahun. Hal ini untuk mengatasi keterbatasan anggaran daerah yang menghambat penyediaan fasilitas di Pasar Kayubulan.
- d. Sebaiknya, Kepala Daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gorontalo membuat item peraturan yang baru tentang penetapan wajib retribusi serta mekanisme pemungutan sampai dengan penyetoran retribusi. Agar Kepala Disperindag beserta staf yang berwenang, memiliki dasar untuk membuat dan menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam pengelolaan retribusi di Pasar Kayubulan
- e. Sebaiknya, Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo mendirikan atau memilih dan menetapkan Perusahaan Daerah (PD) yang bertanggung jawab secara khusus dalam pengelolaan retribusi di Pasar Kayubulan untuk mewujudkan efektivitas pelaksanaan kebijakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggara, S. (2014). *Kebijakan Publik*. Bandung: Pustaka Setia.
- Tahir, A. (2014). *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Bandung: Alfabeta.
- Kadji, Y. (2015). *Formulasi Dan Implementasi Kebijakan Publik Kepemimpinan dan Perilaku Birokrasi dalam Fakta Realitas*. Gorontalo: UNG Press.
- Alamsyah, K. (2016). *Kebijakan Publik Dan Konsep Aplikasi*. Bandung: Media Citra Mandiri Press.
- Pasolong, H. (2016). *Teori Administrasi Publik*. Bandung: PT Alfabeta.
- Rachmat dan Gunawan. (2016). *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Widodo, Suparko Eko. (2015). *Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- T. Keban, Y. (2014). *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik Konsep, Teori, dan Isu*. Yogyakarta: Gava Media.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2014). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Moleong, Lexy J. (2006). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Subarsono, A. (2005). *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan*. Yogyakarta: CV. Andi Offset.
- Fahmi, Irham. (2018). *Perilaku Organisasi Teori, Aplikasi, dan Kasus*. Bandung: PT Alfabeta.

- **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gorontalo Nomor 6 Tahun 2017 tentang Retribusi Jasa Umum

Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 40 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi, Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gorontalo.

Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Tata Kerja Badan Keuangan Kabupaten Gorontalo.

- **Junal Penelitian**

Murniati, S., & Kasasih, D. (2017). Analisis kontribusi dan efektivitas penerimaan retribusi pelayanan pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang. *Jurnal Kompetitif*, 6(1).

Toduho, D. A. M., Saerang, D. P. E., & Elim, I. (2014). Penerimaan retribusi pasar dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah kota tidore kepulauan. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 2(2).

Dwika, S. A. P., Kismartini, K., & Dwimawanti, I. H. (2020). Implementasi Kebijakan Retribusi Pelayanan Pasar di Pasar Adiwerna Kabupaten Tegal. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 2(3), 561-572.

Mubarok, D. H. N. (2017, January). Potensi Penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar Dan Kontribusi Serta Prospeknya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Samarinda. In *FORUM EKONOMI* (Vol. 18, No. 2, Pp. 95-110).

Ika Wahyuni, A. W. A. N. D. A. (2016). Upaya Dinas Pasar Dalam Meningkatkan Pendapatan Retribusi Pelayanan Pasar Di Kabupaten Sidoarjo (Studi Di Dinas Pasar Kabupaten Sidoarjo). *Publika*, 4(5).

Noviani, A., & Masdjojo, G. N. (2018). Pengelolaan Retribusi Pelayanan Pasar Di Kabupaten Pematang. *Telaah Manajemen*, 15(1), 1-13.

Datumola, A. A., Dengo, S., & Kolondam, H. (2020). Evaluasi Kebijakan Retribusi Pelayanan Pasar Tradisional Di Kabupaten Minahasa (Studi Di Pasar Tradisional Tondano Barat). *Jurnal Administrasi Publik*, 6(88).

Idrus, Ilato & Mozin. (2020). Implementasi Kebijakan Retribusi Pelayanan Pasar Di Pasar Sentral Kota Gorontalo. *Jambura Journal Of Administrative And Public Service*, 1(1), 1-10.

Akib, H. (2012). Implementasi kebijakan: Apa, mengapa dan bagaimana. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik*, 1(1), 1-11.

- DAERAH, D. M. P. A. (2019). Manajemen Pengelolaan Retribusi Pasar Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di Kota Kendari.
- Harahap, M. Y., & Wicaksono, B. (2016). *Implementasi Kebijakan Retribusi Pelayanan Pasar Sangkumpul Bonang Kota Padangsidempuan Tahun 2013-2015* (Doctoral dissertation, Riau University)
- Kumendong, J. V., Morasa, J., & Tirayoh, V. Z. (2019). Analisis potensi penerimaan retribusi pelayanan pasar pada PD. Pasar di Kota Manado. *Indonesia Accounting Journal*, 1(2), 97-104.
- Putri, V. D., & Sahuri, C. (2019). *Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum (Studi Kasus Retribusi Pelayanan Pasar Air Tiris)* (Doctoral dissertation, Riau University).
- Leasiwal, D., Laloma, A., & Palar, N. A. (2018). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Retribusi Pasar Dalam Menunjang Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Pulau Morotai (Suatu Studi Di Dinas Perindakop Dan Umkm). *Jurnal Administrasi Publik*, 4(49).
- Lingarwati, D. (2017). Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Melalui Pengelolaan Retribusi Pelayanan Pasar (Studi Di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Nganjuk). *Publika*, 5(1).
- Hohakay, K., Rompas, W., & Rares, J. (2015). Implementasi Kebijakan Retribusi Pasar Dalam Menujang Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Halmahera Utara. *Jurnal Administrasi Publik*, 2(30).
- Ifandri, P., Kalangi, J., & Rumawas, W. (2018). Implementasi Kebijakan Retribusi Pasar Tradisional Higienis Bahari Berkesan Kota Ternate. *Jurnal Administrasi Publik*, 1(043).
- Perdana, B. N., & Rengga, A. (2017). Implementasi Kebijakan Retribusi Pelayanan Pasar Kembangari Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8 Tahun 2011 (Telaah Pasal 61). *Journal Of Public Policy And Management Review*, 6(4), 275-287.
- Hasanuddin, H., & Yingga, M. M. (2015). *Kebijakan Pemungutan Retribusi Pasar Pelita Bangko Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2011-2013* (Doctoral Dissertation, Riau University).
- Atmuria, F., & Khaidir, A. (2020). Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Retribusi Jasa Umum Dalam Pengelolaan Retribusi Pasar Di Pasar Raya Padang. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara ASIAN (Asosiasi Ilmuwan Administrasi Negara)*, 8(2), 91-101.

- Subekti, M., Faozanudin, M., & Rokhman, A. (2017). Pengaruh komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi terhadap efektifitas implementasi program bantuan operasional sekolah pada satuan pendidikan Sekolah Dasar Negeri di Kecamatan Tambak. *The Indonesian Journal of Public Administration (IJPA)*, 3(2), 58-71.
- Anam, S., & Zauhar, S. (2015). Implementasi Kebijakan Retribusi Pelayanan Parkir di Kabupaten Pamekasan. *Reformasi*, 5(2), 358-371.
- Syarif, A., & Unde, A. A. (2014). Pentingnya komunikasi dan informasi pada implementasi kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kota Makassar. *KAREBA: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 142-152.
- Suryana, A., Lisarini, E., & Larasati, A. K. (2021). Pengaruh Penerapan Standard Operating Procedure (Sop) Dan Kebijakan Pertanian Terhadap Efektivitas Layanan Sub Terminal Agribisnis (Studi Kasus di UPTD Sub Terminal Agribisnis dan Agropolitan Cigombong, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur). *AGROSCIENCE*, 11(1), 29-43.
- Purba, I. E., Kiyai, B., & Rumapea, P. (2018). Pengaruh Implementasi Kebijakan Standar Operasioal Prosedur Terhadap Kinerja Pegawai Pada Sekretariat Kota Manado. *Jurnal Administrasi Publik*, 4(5).